

### BAB III

## KEBIJAKAN PERANG PRESIDEN GEORGE W BUSH DI TIMUR TENGAH

Dalam bab ini dibicarakan mengenai pemerintahan George W Bush beserta serangkaian kebijakannya terutama di kebijakan dibidang militer serta hal-hal yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton, kebijakan militer bukan merupakan program 'unggulan' atau focus utama. Hal ini terlihat dari proposal permohonan dana untuk program-program tahunan yang diajukan Presiden kepada pemerintah federal selama Clinton berkuasa. Pengajuan anggaran untuk militer dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan angka yang signifikan, sehingga alokasi dana untuk program-program yang bersifat ekonomi dan kerakyatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Setelah pemerintahan Clinton berakhir, maka Amerika Serikat kembali memasuki masa pemilihan presiden yang baru. Pemilihan dilakukan sebagai perwujudan dari sistem demokrasi konstitusional yang dianut Amerika Serikat. Dalam demokrasi partisipasi politik merupakan suatu cara seseorang menyatakan, menentukan, atau mengungkapkan kemampuan dirinya menciptakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam sebuah pemilihan. Pemilihan diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan dengan aturan-aturan: *winner takes all, the single-member district sistem, the plurality and majority rule, the Electoral College*<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Nur Rahmat Y, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2000 dan Hikmahnya Bagi Indonesia*. Laporan Penelitian. Artikel tersebut di download penulis pada website Richi, Rob, *Electoral collage*, [http://www.igc.org/cvd/op\\_des/oped\\_991029.html](http://www.igc.org/cvd/op_des/oped_991029.html), October 29, 1999

Dalam pemilihan umum tahun 2000, dilakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh kandidat Presiden George W. Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Demokrat yang memperebutkan 538 suara elektoral, dengan partisipasi 105.326.325 rakyat pemilih. Juga diadakan pemilihan 435 anggota DPR (*the House of Representative*) yang diikuti oleh 835 kandidat, dan 34 Senator yang diikuti oleh 75 kandidat<sup>17</sup>.

Ternyata kubu Al Gore mengklaim hasil penghitungan suara para pemilih di Florida, yang saat itu juga merupakan negara bagian yang paling terakhir merampungkan penghitungan suara. Sehingga terjadi persengketaan di Pengadilan. Setelah melalui beberapa tahap persidangan termasuk oleh Mahkamah Agung Florida, akhirnya Mahkamah Agung Federal memutuskan sengketa hasil penghitungan suara ini, dan George W. Bush dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika ke-43.

Dengan adanya hasil kemenangan yang kontroversial ini dapat kita lihat bahwa George W. Bush tidak terlalu memiliki rancangan-rancangan program ekonomi yang sangat memukau untuk dapat menarik perhatian pemilihnya seperti yang umumnya terjadi dalam kampanye pemilu presiden Amerika. Bahkan kemenangan 'semacam' ini hanya pernah terjadi dua kali dalam sejarah pemilihan presiden AS, yaitu pada tahun 1876 dan sekarang terjadi lagi pada kandidat calon presiden Al Gore.

---

<sup>17</sup> Marthen Napang, *Al Gore V. George W. Bush dalam pemilihan presiden Amerika 2000: Persengketaan hasil pemilihan umum di Florida*

[http://umma.lontar.ui.ac.id/lonac/themes/libri2/detail\\_isp?id=73624&lokasi=lokal](http://umma.lontar.ui.ac.id/lonac/themes/libri2/detail_isp?id=73624&lokasi=lokal)

Perbedaan latar belakang dan dukungan juga akan memberikan corak yang sangat berbeda dari pemerintahan Bill Clinton sebelumnya dan pemerintahan George W Bush yang nantinya akan berkuasa. Berlatarbelakang keluarga yang semuanya terlibat dalam politik, George W Bush memiliki kemampuan memimpin dan kritis juga taktis dalam permasalahan nasional. George W. Bush yang dalam kampanyenya menyerukan untuk merubah kekuatan militer Amerika menjadi yang lebih baik dengan tidak mengganggu alokasi dana bagi pembangunan meyakinkan masyarakat bahwa dialah kandidat terbaik menjadi presiden. Dan hal itu akan segera terlihat tidak lama setelah ia menjabat sebagai presiden AS yang ke 43.

#### **A. Kebijakan Militer George W Bush**

Pada tahun pertama masa jabatannya, pemerintahan Bush telah mendapatkan 'kejutan' yang sangat tidak menyenangkan terutama bila dikaitkan dengan serentetan gelar super yang dimiliki Amerika Serikat. Peristiwa pengeboman gedung WTC dan gedung Pentagon pada tanggal 11 September 2001 oleh sekelompok teroris merupakan tamparan dahsyat bagi Negara besar Amerika yang diketahui dunia memiliki pertahanan militer yang kuat.

Keamanan nasional pasca peristiwa teror 11 September 2001 telah menjadikan meningkatnya kekuasaan eksekutif meski pada bidang yang tidak berkaitan dengan operasi militer. Kekuasaan eksekutif yang meningkat melebihi hukum dan pemaksaan pelaksanaan undang-undang ini berkembang

cepat dan begitu mengkhawatirkan rakyat Amerika yang masih percaya pada sistem “*separatism of power*”<sup>18</sup>.

Goerge W Bush menggantikan kedudukan Bill Clinton pada 2001 mencoba memperluas kekuasaan eksekutif, memusatkan programnya pada keamanan nasional AS, dan cita-cita ini begitu cepat menjadi kenyataan. Dipandang dari peristiwa 11 September 2001 dan perang Afganishtan, kejayaan militer teknologi tinggi ketiga AS dalam 10 tahun, Bush lebih pandai dari presiden Reagan maupun George Bush – ayah George Walker Bush – yang memiliki keahlian politik dipanggung global lebih baik dari Walker Bush. Meskipun tidak berinisatif melakukan permusuhan militer, kenyataannya perang melawan terorisme yang didiskripsikan sebagai ‘sesuatu yang tidak pernah berakhir’ telah memungkinkannya untuk menegaskan kembali kekuatan Amerika dan mempergunakan kekuatan politik yang dimilikinya. Bush menampilkan keunggulan teknologi dan militer AS secara luas seperti yang dilakukan oleh Clinton dan George Bush, di Iraq yang merupakan nilai abadi sebuah ‘kekuatan’ pada periode setelah perang dingin. Maka ‘penyamaan’ strategi masa lalu tertulis kembali secara global saat ini.

Secara domestik, perang telah mendorong kebangkitan kembali usaha memperkuat keamanan nasional suatu Negara, dalam hal ini AS, yang mengijinkan Bush untuk menegaskan kewenangannya dan membenarkan pembatasan pada pembuat undang-undang dan pengadilan. Kemudian guna

---

<sup>18</sup> Philiip S Golub, American Caesar: “*Background in Washington's War on Terror*”, Global Issues January 2002, di download 22 Maret 2011,

<<http://www.globalissues.org/Geopolitics/middleEast/terrorInUSA/Caesar.asp>>

mengubah Negara semi otoritarian, Bush membangun pemerintahan yang kuat dan menyatukan berbagai bidang yang intervensionis dan kecenderungannya menjalankan sendiri.

Sistem peradilan parallel (*pararel judicial sistem*) untuk perang terhadap terorisme merupakan fakta keberhasilan Bush memperluas kekuasaan eksekutifnya. Dengan sikap penuh kepatuhan, Senat Amerika – yang dikendalikan oleh partai Demokrat – dan House of Representative benar-benar dapat melepaskan kendalanya atas '*USA Patriot Act*' yang diundangkan enam minggu setelah peristiwa pemboman oleh teroris 11 September 2001. Dengan UU tersebut pemerintah Federal mempunyai kewenangan yang besar untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan dengan memangkas sejumlah prosedur dan menghapuskan sejumlah jalur birokrasi. Berdasarkan UU ini penyelidik bisa mendapatkan surat jaminan untuk melakukan penyadapan percakapan telepon dan memonitor surat elektronik dari berbagai komputer. Bahkan petugas dapat mengakses rekening bank, catatan medis, hingga catatan lalu lintas buku di perpustakaan<sup>19</sup>. *USA Patriot Act* ini memberikan kewenangan untuk penangkapan dan penahanan tanpa bukti jelas bagi orang-orang non kewarganegaraan Amerika yang statusnya diragukan oleh pemerintah AS. Dan sekitar 1200 orang ditangkap setelah peristiwa 11 September dan masih dipenjarakan hingga beberapa bulan bahkan tahun, tanpa seorang pun dari mereka mengetahui dengan tuduhan apa mereka ditangkap. Sementara itu

---

<sup>19</sup> Sekilas patriot act. republik 24 desember 2005

para tahanan dan keluarganya tidak memiliki akses terhadap bukti-bukti yang akan digunakan untuk melawannya. Pemerintahan Bush menciptakan pengadilan militer luar biasa yang tapan 'input' dari Kongress atau *supreme court* lain yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara, mengadili dan menghukum mati bagi yang ditemukan bersalah. Teroris dan penjahat perang akan diidentifikasi begitu saja oleh kewenangan eksekusi secara langsung berdasarkan saksi dan bukti rahasia. Kerahasiaan ini juga berlaku untuk tempat pertemuan, cara kerja dan laporan rapat, pertimbangan mendalam, keputusan, dan susunannya. Tidak seperti pengadilan militer sebagaimana mestinya, terdakwa disini tidak memperoleh hak naik banding, meskipun mereka menghadapi hukuman mati.

Peradilan untuk memerangi terorisme melalui semacam ini melawan peraturan hukum Amerika, yang dalam teorinya menggunakan asas persamaan bagi semua dalam yurisdiksinya, termasuk untuk membentuk sebuah '*paralel judicial sistem*'. Perubahan otoritarin ini sebenarnya tidak dapat dijadikan teladan dalam sejarah AS saat ini.

Di bidang militer, George W Bush juga mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ambisinya untuk meningkatkan pembangunan angkatan militer dengan dalih *War on Terrorism*-nya. Sebenarnya pembangunan militer telah terlihat jelas sejak pemerintahan Ronald Reagen, namun makin memuncak ketika Bush berkuasa pada tahun 2001 sampai terpilihnya kembali di pemerintahan periode keduanya tahun 2005.

Perubahan model pembangunan militer dibawah pemerintahan Bush ini lebih dari sekedar tujuan membangun sektor-sektor teknologi tinggi atau pengendalian depresi ekonomi, akan tetapi ditujukan untuk menjaga keberlangsungan posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya 'superpower' dunia. Keberlangsungan menjaga dominasi AS tidak terlepas dari keharusan pengendalian komoditas perdagangan paling penting dunia yakni 'energi'. Amerika telah mengimpor 52% minyak dan menumbuhkan sebagian ladang sumber gas alam melalui investasi perusahaan-perusahaan besarnya seperti Shell, Exxon Mobile, Chevron/Texaco ke berbagai Negara potensial sumber daya alam, kemudian menghasilkan keuntungan besar. Dan yang menjamin pengendalian ini adalah salah satu fungsi utama militer Amerika.

Perubahan model militer Bush saat ini secara langsung dimotivasi oleh ekonomi, bukan sebagai persaingan 'superpower' Uni Soviet pada masa perang dingin. Seperti telah dituturkan seorang pengamat dan kritikus militer AS Michael Klare dalam bukunya 'Resource War', bahwa kebijakan politik Amerika fokus terhadap sumber daya global. Departemen Pertahanan dan beberapa kekuasaan pusat utama AS yang lain telah melihat dengan jelas bahwa sumber daya energi alam Timur Tengah merupakan 'kepentingan vital' yang memerlukan pengeluaran militer cukup besar dan mengekspor persenjataan tingkat tinggi kepada rezim langganan di kawasan ini. Sekitar tahun 1990 dan 1997 Amerika telah mengirimkan \$42 milyar persenjataan untuk kawasan Persia Gulf States, \$36 milyar dari angka tersebut dialirkan ke Saudi Arabia.

Militer Amerika saat ini membangun kehadiran jangka panjangnya di kawasan Asia Tengah, yang dengan tanpa keraguan digunakan untuk menjaga persediaan minyak dan gas wilayah Kaspia yang melimpah. Pentagon hingga saat ini menerima pemerintah Uzbekistan yang memberikan pelatihan militer bagi pemerintah AS sejak tahun 1995 dan memimpin latihan militer di Uzbekistan sejak tahun 1999. Pada November 2001 militer AS telah memulai negosiasi dengan pemerintah Tajikistan untuk menggunakan wilayahnya selama AS perang di Afghanistan.

Kekuasaan Amerika memainkan peran di Asia Tengah, dalam jangka pendek, secara dramatis meningkatkan kemungkinan militer AS mengganti mencapai tujuan yang diteruskan oleh Komisi Keamanan Nasional abad 21, yang menjamin kendali persediaan energi global dan mempertahankan posisi AS sebagai satu-satunya 'superpower'.

Pembangunan militer untuk menjadikan militer lebih kuat telah menjadi tujuan yang ingin dicapai karena telah menjadi kepercayaan oleh para pembuat kebijakan Amerika bahwa militer merupakan sebuah alat yang efektif untuk menjamin kontrol terhadap sumber minyak dunia.

#### 1. **Invasi AS terhadap Afghanistan**

Perlawanan terhadap terorisme dunia telah dilakukan AS sejak pemerintahan sebelum George Walker Bush. Akan tetapi penghancuran beberpa jantung kekuatan Amerika, Pentagon dan WTC (*World Trade Center*) secara bombastis pada 11 September 2001 oleh

sekelompok teroris merupakan tamparan dahsyat bagi Negara besar Amerika yang diketahui dunia memiliki pertahanan militer yang kuat.

Peristiwa 11 September 2001 bagi pemerintahan Bush disebut sebagai peristiwa Pearl Harbour abad 21, yang merupakan awal 'perang global'. Sementara itu, aksi terror 2001 merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan arogansi AS dalam panggung perpolitikan internasional. Proses pencarian terhadap siapa yang bertanggungjawab atas tindakan terror adalah menghubungkan dengan beberapa kasus yang terjadi di masa lalu dan menyimpulkan pola kerja teroris. Dan Osama bin Laden dan kelompoknya memiliki pola tersendiri seperti serangan bom terkoordinasi pada hari yang sama, bertujuan untuk membuat kerusakan maksimal dan tidak ada peringatan sebelumnya akan serangan tersebut. Serangan terror 11 September 2001 menelan korban hingga 20.000 orang karena di dalam kompleks WTC terdapat mall dengan kapasitas pengunjung 10.000 orang ditambah pegawai WTC sekitar 10.000 orang<sup>20</sup>. Perburuan terhadap pelaku terror menuju pada kelompok teroris Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden di Afghanistan dilaksanakan AS sekaligus menjatuhkan rezim Thaliban.

Peristiwa 11 September tersebut mendorong AS untuk mencari dukungan perang melawan terorisme. Propaganda yang dilakukan AS tidak memerangi Afghanistan tetapi hanya mencari Osama bin Laden.

---

<sup>20</sup> Astuti, Khandi Yuni, *Kebijakan Luar Negeri RI terhadap Serangan AS ke Afghanistan*, dalam Skripsi IJMY 2002. Data didapat oleh penulis tersebut dari akses internet 30 November 2001 pada

Menteri pertahanan saat itu, Donald Rumsfeld berkeliling Timur Tengah untuk membangun koalisi dengan Arab Saudi, Oman, Mesir, Uzbekistan, dan Turki. Amerika berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai Negara. Perancis dan Georgia menyediakan pangkalan udaranya digunakan oleh pesawat-pesawat AS, serta bersedia memberikan dukungan logistik bagi pasukan AS di laut India. Kongres Jepang menyediakan pangkalan udaranya digunakan oleh pesawat-pesawat AS, serta bersedia memberikan dukungan logistik bagi pasukan AS di laut India. Kongres Jepang juga menyediakan transportasi pesawat untuk mengangkut para pengungsi keluar dari Afganistan. Pasukan elit Inggris, *Special Air Service* bergabung dengan tentara AS. Sekitar 1000 pasukan AS berada di Uzbekistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan setelah Negara tersebut mengizinkan pangkalan udaranya dipakai untuk keperluan pesawat-pesawat AS. Pasukan marinir AS berjumlah 1000 orang berada di sebuah gunung batu Sierra Nevada sebagai adaptasi tindakan di Afghanistan dan melakukan pelatihan. Aliansi Utara menggerakkan pasukannya sehingga mendekati 56 km kota Kabul. Inggris dan Pakistan mengultimatum Taliban untuk segera menyerahkan Osama bin Laden. Dan AS sendiri memanfaatkan sejumlah armada kapal induk dan pangkalan udara seperti kapal induk USS Carl Vincent, USS Enterprise, USS Kitty Hawk, USS Theodore Roosevelt<sup>21</sup>. Bahkan

AS memberikan bantuan pada oposisi yang menentang pemerintah Afghanistan, supaya terjadi pecah belah rakyat.

Pemerintah Amerika mengambil keputusan untuk membasmi teror dengan menyerang Afghanistan pada 7 Oktober 2001, dibantu Inggris pada pukul 16.45 waktu setempat. Serangan pertama dengan menembakkan rudal dari kapal penjelajah AS dan Inggris yang berada di Laut Arab. Serangan kedua dengan menggunakan kapal selam Inggris, beberapa pesawat pembom dan bomber yang terbang dari pangkalan Inggris, Diego Garcia, Lautan Hindia. Tiga kota yang menjadi sasaran adalah Kabul, Kandahar, dan Jalalabad.

Peperangan berhasil menguasai Kabul sehingga membuat Taliban terdesak mundur dan akhirnya runtuh. Sampai saat ini tidak terdengar lagi kabar tentang Osama bin Laden dan Mullah Muhammad Omar meskipun pencarian terhadap mereka tetap berlangsung. Masih terdapat tanda tanya besar dalang peristiwa 11 September 2001, akan tetapi banyak pula keraguan mengenai kesimpulan intelijen AS atas pelaku teror tersebut, sehingga pemerintah AS juga perlu mempertanyakan kinerja intelijennya. Terlebih tindakan mengejar seorang Osama telah menghancurkan pemerintahan suatu Negara, yaitu pemerintahan Taliban di Afghanistan. Disamping itu, peperangan ini otomatis telah meningkatkan anggaran 'The Fed' untuk membiayai militer dalam pemeliharaan dan operasi militer.

## 2. Invasi AS terhadap Iraq

Isu 'senjata pemusnah massal' (*weapon of mass destruction*) telah membawa Amerika ke dalam perang kedua dibawa pemerintahan Bush Jr., setelah perang melawan terror dan perburuan Al Qaeda –yang dianggap sebagai pelaku terror – ke Afghanistan. Isu ini telah menjadi '*Disarmament Policy*' – kebijakan pelucutan senjata, dalam hal ini senjata pemusnah massal Irak – internasional yang tentu saja melibatkan PBB, sejak tahun 1996. Permasalahan ini timbul sejak kasus invasi Irak terhadap Kuwait. Komisi khusus PBB untuk pelucutan senjata, UNSCOM, ditugaskan sebagai pengawas dan pemeriksa 'pemusnahan' seluruh senjata pemusnah di Irak sesuai dengan resolusi DK PBB 687, bertujuan untuk memastikan apakah Irak akan benar-benar menghancurkan seluruh program Irak dalam mengembangkan, menciptakan, dan mengirim berbagai macam senjata. Akan tetapi pemboman udara oleh AS dan Inggris pada 1998 yang sebenarnya untuk memaksa Irak supaya 'rela' menerima tim UNSCOM tersebut justru mengakibatkan penolakan penuh Irak untuk menerima tim inspeksi senjata tersebut.

Keruntuhan UNSCOM digantikan oleh UNMOVIC, didirikan berdasarkan resolusi DK PBB 1284. Sejauh inspeksi senjata oleh PBB tersebut berjalan bertahun-tahun tetap tidak selesai, Amerika terus mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk memaksa Irak melucuti persenjataannya. Hal ini ditekankan oleh Bush dalam

pidatonya bahwa Irak mempunyai senjata biologi, nuklir, kimia dan rudal balistik dengan jarak tempuh hingga 150 km, dan jika PBB tidak mau bertindak AS akan bertindak sendirian. Untuk itu pada 25 Oktober 2002 AS dan Inggris mengajukan resolusi ke PBB sebagai tuntutan keras pelucutan senjata dan mengancam akan menggunakan kekuatan senjata jika Irak menolak pelucutan senjata.

Tim inspeksi senjata PBB kembali datang ke Irak 25 November 2002 dan memulai tugasnya 27 November dua hari setelah kedatangannya. Laporan pertama tim inspeksi senjata menyatakan bahwa Irak tidak cukup kooperatif dan bukti-bukti mengenai senjata pemusnah massal belum dapat disaring. Laporan kedua 14 Februari 2003 oleh kepala intel AS Hans Blix bersama kepala Badan Atom Internasional (IAEA) Mahmoud El Baradei, menyampaikan bahwa Irak kooperatif dan tidak ditemukan senjata pemusnah massal. Sebagai respon 'tidak puas' dengan laporan tersebut AS mengajukan resolusi baru ke PBB dengan tuduhan Irak tidak mematuhi kewajiban pelucutan senjata. "*Irak has failed to take the final opportunity afforded it by resolution 1441*"<sup>22</sup>. Bush berkata dalam pidatonya 31 Maret 2003, "*If Saadam had only intention of disarming we would disarm him now*"<sup>23</sup>. Begitu juga disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih saat itu, bahwa AS puas jika Saddam sudah tidak

<sup>22</sup> Trisia, *Respon Negara Rusia Terhadap Rencana AS Menyerang Irak*, dalam skripsi, UMY 2003. Data diakses oleh penulis tersebut pada situs [www.armskontrol.org](http://www.armskontrol.org), 13 April 2003

<sup>23</sup> *Ibid.*, diakses penulis tersebut pada situs [www.time.com/time/world/article/0,8599,430194,00.html](http://www.time.com/time/world/article/0,8599,430194,00.html), 13 Juni 2003

berkuasa lagi. Tentu saja tuntutan tersebut sulit dipenuhi oleh sekumpulan orang yang tergabung dalam tim inspeksi senjata PBB. Kemudian didukung oleh sebuah pernyataan Barton Gellman dan Walter Pincus dalam sebuah artikel besar Washington Post 10 Agustus, menyimpulkan bahwa *"the US government not only made allegations depicting Iraq's nuclear weapons programme as more active, more certain and more imminent in its threat than the data they had would support but also withheld evidence that did not conform to their views. Moreover, the White House seldom corrected misstatements or acknowlwdged loss of confidence in information upon which it had previously relied."* Bahkan akhirnya Badan Inteligen AS menyatakan tidak ada bukti bahwa Iraq mempunyai senjata pemusnah massal<sup>24</sup>.

Hingga tahun 2003 konflik senjata pemusnah massal Iraq belum terselesaikan. Amerika mengambil alih inspeksi senjata oleh PBB dengan invasi Iraq pada Maret 2003. Usaha AS tidak hanya melalui diplomasi namun juga mempersiapkan militernya. Para perancang strategi perang AS mempersiapkan pasukan khusus yang terdiri dari warga Iraq yang telah membelot kemudian lari ke AS dan dari Negara lain yang berjumlah 5000 orang yang berangkat dari AS. Mereka akan terlibat dalam proses invasi hingga naiknya pemerintahan sipil paska Saddam sebagai pemandu serta penghubung antara militer dan warga

---

<sup>24</sup> Stephen Pullinger, *US Policy: WMD, Good or Bad*, The Acronym Institute, 2003, <http://www.acronym.org.uk/dd/dd73/73news04.htm>, didownload 1 April 2011.

sipil, penjaga kamp perang, penasihat lapangan perang dalam pertempuran, dan penerjemah bahasa. Departemen Pertahanan AS saat itu mempersiapkan dana sebesar 92 juta dolar AS untuk melatih pasukan siap tempur tersebut<sup>25</sup>. Tentara AS yang dipersiapkan sejumlah 120.000 personel, sedangkan tentara teluk sejumlah 65.000 personel.<sup>26</sup>

Kebijakan perang Presiden Bush yang sangat ambisius juga mengakibatkan munculnya pendanaan yang sangat besar untuk bidang militer. Dana ini mencakup segala proyek militer mulai dari pengembangan peralatan militer hingga ke eksekusi kebijakan di Afghanistan, Irak dan pemberian kompensasi kepada Negara-negara yang mendukung kebijakan perang Presiden Bush.

#### **B. *Military Expenditure***

Periode pemerintahan George W Bush telah mengadakan pendanaan militer besar-besaran. Pendanaan militer ini adalah dana-dana yang digunakan untuk seluruh program yang diidentifikasi sebagai program militer yang meliputi biaya militer untuk perang, perintah pembayaran bagi militer dan pengunduran diri CIA, sistem kesehatan militer, penjualan peralatan, bantuan militer, pelatihan militer, hingga santunan bagi veteran. Dan semua program tersebut dijalankan oleh Departemen Pertahanan, Departemen Energi, dan program-program terkait lainnya yang

---

<sup>25</sup> Trisia, loc.cit

<sup>26</sup> *Ibid.*

berhubungan dengan militer yang dijalankan oleh *Homeland Security Department*, Departemen Hukum dan lembaga lainnya di AS. Pembelanjaan militer pada masa pemerintahan Bush ini dituangkan dalam suatu kebijakan politik yang diputuskan sebagai “kebijakan perang terhadap terorisme dan senjata pemusnah massal”.

Pendanaan militer terbesar yang dikeluarkan pemerintahan Bush berkaitan dengan kebijakan perang yang diputuskan atas isu terorisme dan senjata pemusnah massal yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika, yakni invasi AS ke Afghanistan dan Irak. Akan tetapi kedua isu yang melatarbelakangi kebijakan politik tersebut lebih jauh didorong oleh kekuatan sebuah ‘*Military Industrial Complex*’ sebagai kelompok kepentingan besar di Amerika, yang terdiri dari kelompok militer profesional, manajer dan pengusaha yang usahanya terkait dengan penyediaan barang dan jasa militer, pejabat pemerintahan yang karirnya tergantung pada industri militer, yang sedikit banyak tergabung dalam perusahaan-perusahaan industri militer. Pada intinya, kelompok kepentingan ini menggunakan beberapa metode untuk mencapai tujuannya, yakni penempatan orang di lembaga eksekutif, loby untuk mendapatkan pengaruh dengan menciptakan ideologi konflik dan mendanai kampanye pemilu pejabat pemerintahan, dan menggalang opini publik.

Sebagai hasil permainan dengan lobi eksekutif, dalam anggaran keuangan 2002 kelompok kepentingan tersebut menerima kontrak dari Pentagon lebih dari \$42 milyar; \$17 milyar untuk Lockheed Martin, \$16,6

milyar, dan \$8,7 milyar untuk Northrop Grumman, peningkatan angka hampir sepertiga dari ongkos kontrak militer tahun 2000 masa pemerintahan Clinton. Ketiga perusahaan yang dikenal dengan nama *the big three* ini ditempatkan dalam rencana dan produksi alat-alat penarget, peralatan perang elektronik, sistem penemuan jarak jauh, dan alat-alat amunisi.<sup>27</sup> Hingga akhir satu periode kepemimpinan Bush di akhir tahun 2004 telah tercatat 10 teratas perusahaan industri militer yang menerima uang kontrak dari Pentagon.

**Tabel 3.1**  
**Kontraktor Teratas untuk Proyek Pertahanan AS<sup>28</sup>**  
**Tahun 2001 dan 2004 (dalam milyar US\$)**

No	Perusahaan	Kontrak Th. 2001	Kontrak Th. 2004
1	Lockheed Martin Corp	14,7	20,7
2	The Boeing Co.	13,3	17,1
3	Northrop Grumman	5,2	11,9
4	General dynamics	4,9	9,6
5	Raytheon Co.	5,6	8,5
6	Halliburton Co.	0,4	8,0
7	United Technologies	3,8	5,1
8	Science application Internation Corp.	1,7	2,5
9	Computer Science Corp.	0,8	2,4
10	Humana Inc.	0,4	2,4

Sumber: Direktorat Informasi Operasi dan Laporan Departemen Pertahanan AS

Dengan kebijakan invasi militer ke Afghanistan dan Irak telah menambah keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pemasok

<sup>27</sup> Willian D. Hartung, *US: Making Money on Terrorism*, The Nation, PostedL February 5<sup>th</sup>, 2004, p.1, di download 25 April 2011, <http://www.thenation.com/doc/20040223/hartung>.

<sup>28</sup> Department of Defense, *Top Defense Contractor*, article id=7632, U.S Labor AgianstWar, Januari 28<sup>th</sup>, 2005, didownload 25 Maret 2011, <<http://www.uslaboragainstwar.org/article.php?id=7632>>

kebutuhan teknologi militer, tentu saja dengan pengaliran dana dari pemerintah Federal.

**Tabel 3.2**  
**Anggaran Militer AS Tahun 1997 - 2008<sup>29</sup>**  
**(berdasarkan current dollar)**

THN	Th. 1997	Th. 1998	Th. 1999	Th. 2000	Th. 2001	Th. 2002	Th. 2003	Th. 2004	Th. 2005	Th. 2006	Th. 2007	Th. 2008
Jumlah Anggaran Pertahanan	264.000.000	257.400.000	258.600.000	294.452.000	304.880.000	348.556.000	404.920.000	455.908.000	479.090.000	535.000.000	601.000.000	669.000.000

Sumber: The Budget of the United States Government, Fiscal Year 1997-2008.

Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan masa pemerintahan Bill Clinton menurun terhitung pada awal periode kedua hingga akhir periode kedua tahun 2000. Berturut-turut penurunan anggaran pertahanan adalah 3,3 persen, 3,1 persen, 3,0 persen dan 3,0 persen di tahun 2000.<sup>30</sup> Namun ketika Bush menggantikan kedudukan Clinton, penurunan anggaran militer yang dicetak Clinton berubah menjadi sebuah lonjakan.

Besarnya pembelanjaan militer Amerika tersebut sudah mencakup biaya-biaya untuk tentara, biaya pemeliharaan dan operasi militer, pengadaan senjata, penelitian, pengembangan, tes dan evaluasi, konstruksi militer, aktivitas-aktivitas pertahanan energy atom, dan aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan pertahanan militer seperti kontribusi bagi Negara-negara yang mendukung perang Amerika terhadap terorisme.

<sup>29</sup> Office of Management and Budget, The Budget of the United States Government, Historical Table, fiscal year 1997 – 2008. Didownload April 2011  
 <<<http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy97/pdf/hist.pdf>>>

<sup>30</sup> *Ibid*

Hal ini dapat dilihat pada table 3.3 yang memperlihatkan data pengeluaran perang Iraq dan Afghanistan.

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran Untuk Perang Irak dan Afghanistan**  
**Tahun Fiskal 2001 – 2008<sup>31</sup>**  
**(CRS estimates in billions of dollars of budget authority)**

OPERATION AND SOURCE OF FUNDS	FY01 & FY02	FY03	FY04	FY05	FY06	FY07	FY08
IRAQ	0.0	53.0	75.9	85.5	101.6	131.2	142.1
AFGHANISTAN	20.8	14.7	14.5	20.0	19.0	39.2	43.5
TOTAL	20.8	67.7	90.4	105.5	120.6	170.4	185.6
ANNUAL CHANGE	NA	140%	16%	13%	13%	41%	9%

Notes: NA = not applicable. Totals may not add due to rounding. Total includes \$5.5 billion in FY2003 of DOD funds that cannot be allocated between Iraq and Afghanistan because DOD records are incomplete.

Besarnya anggaran pertahanan militer Amerika dapat dilihat dengan membandingkan sekilas dengan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk perang Irak hingga lebih dari 200 milyar, misalnya.

**Tabel 3.4**  
**Orientasi Anggaran Pertahanan Pada Sub Lebih Spesifik<sup>32</sup>**  
**(dalam Juta dollar)**

Alokasi Dana Pertahanan	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
Military Personnel	66.70	70.10	69.30	75,95	73,97	86,79	106,74	113,57
Operational and Maintenance	88.8 5	88.70	86.22	105,81	111,96	130,00	151,40	174,04
Procurement	48.9	45.6	43.1	51,69	59,98	62,515	67,926	76,216
Penelitian, pengembangan dan tes&evaluasi	36.6	36.0	34.6	37,6	40,4	44,3	53,0	60,7
Military Construction	4,0	3,8	3,8	5,1	4,9	5,0	5,8	6,3
Family Housing	4,2	4,0	3,6	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9
Other	18.4	16.4	15.7	1,6	465	-545	-1,492	1,708
Atomic Energy Defense Activity	12.1	12.9	11.9	12,1	12,9	14,8	16,0	16,6

<sup>31</sup> Amy Belasco. *The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11*, March 29, 2011. Di download dari <http://www.crs.gov/> pada 28 Mei 2011

<sup>32</sup> *The War In Iraq cost*, Cost of War, didownload Maret 2011, <<http://www.costofwar.com/index.html>>

Kemudian besarnya pengeluaran untuk militer juga dapat dilihat dengan membandingkan anggaran pendanaan Negara maju lainnya. (lihat tabel 3.4)

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Pendanaan Militer Amerika Dengan Negara Lain**  
 (dalam Military expenditure: in MER<sup>1</sup> dollar terms)

Rank	Country	Spending level (\$ billions)	Per capita (\$)	World share (%)
1	United States	\$528.7	\$1,756	46%
2	United Kingdom	59.2	990	5
3	France	53.1	875	5
4	China	49.5	370	4
5	Japan	43.7	341	4
6	Germany	37.0	447	3
7	Russia	34.7	244	3
8	Italy	29.9	514	3
9	Saudi Arabia	29.0	1,152	3
10	India	23.9	21	2
11	South Korea	21.9	455	2
12	Australia	13.8	676	1
13	Kanada	13.5	414	1
14	Brazil	13.4	71	1
15	Spain	12.3	284	1
Sub total 15		963.7		83
World		1,158	177	100

Sumber: *SIPRI Yearbook 2007*, Stockholm International Peace Research Institute. ([www.infoplease.com/ipa/A0904504.html](http://www.infoplease.com/ipa/A0904504.html))

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perang yang dikeluarkan oleh Presiden Bush pada masa pemerintahannya telah membuat rekor-rekor pengeluaran militer terbesar dalam sejarah Amerika. Hal ini juga membuat alokasi dana untuk pembangunan domestik menjadi berkurang, dan tentunya hal ini akan memberikan dampak pada perekonomian domestik Amerika Serikat.